



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2025 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, yang meliputi antara lain perkembangan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja Tahun 2025 serta dalam rangka penyesuaian visi, misi, arah kebijakan Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan penyesuaian atas kerangka target kinerja dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini dilakukan melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi seluruh Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya Perubahan Renja 2025 dijadikan pedoman perumusan penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.

Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan kemudahan-kemudahan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 ini, dan mampu meningkatkan kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bandung Barat, 09 Oktober 2025

Plt. KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



HERU BUDI PURNOMO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197009011995031003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LLANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.3.1 MAKSUD	10
1.3.2 TUJUAN.....	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	12
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN 2025 HINGGA TRIWULAN II	12
2.1.1 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	14
2.1.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN 2025 HINGGA TRIWULAN II	19
2.2 ANALISIS KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH	29
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	31
2.4 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG BARAT	32
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	34
3.2 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI.....	36
3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA.....	37
3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA.....	83
DAFTAR GAMBAR	91
DAFTAR TABEL	92



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Bapenda) Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan hasil dari perubahan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Perubahan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Perubahan Tahun 2025 dalam mengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025, Rencana Strategi Bapenda 2025-2029 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sementara itu Kerangka acuan yang mendasari Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat periode 2025-2029 yaitu “Bandung Barat Amanah” yang mewujudkan Bandung Barat yang Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis mengandung makna bahwa sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan seluruh potensi sumber daya manusia yang dapat mengemban kepercayaan masyarakat, makna dan pokok-pokok visi AMANAH.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan pada Subbidang Pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kepala Badan** mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. **Kepala Badan** dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c) pembinaan dan pelaksanaan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b) pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
- c) penyelenggaraan pelaksanaan tugas Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Badan;
- b) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum Badan; dan
- c) pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, serta kepegawaian dan umum.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian



1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.

Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pendataan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang analisa pengembangan, pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB, pendataan pajak daerah lainnya;
- b) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang analisa pengembangan, pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB, pendataan pajak daerah lainnya; dan
- c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang analisa pengembangan, pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB, pendataan pajak daerah lainnya.

Bidang Pendataan, terdiri atas:

- a) Subbidang Analisa Pengembangan;
- b) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB; dan
- c) Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.

Subbidang Analisa Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang analisa pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud),

Subbidang Analisa Pengembangan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang analisa pengembangan;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidanalisa pengembangan; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang analisis pengembangan.

Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendataan pajak daerah lainnya; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pendataan pajak daerah lainnya.

Bidang Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data;
- b) pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data; dan

- c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan pengolahan data.

Bidang Penetapan dan Pelayanan, terdiri atas:

- a) Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB;
- b) Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya; dan
- c) Subbidang Pengolahan Data

Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi PBB dan BPHTB.

Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah lainnya.

Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan data;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan data; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan data.

Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengolahan data;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan data;
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengolahan data.

Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas:

- a) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- b) Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan
- c) Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan.

Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penagihan PBB dan BPHTB; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB.

Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

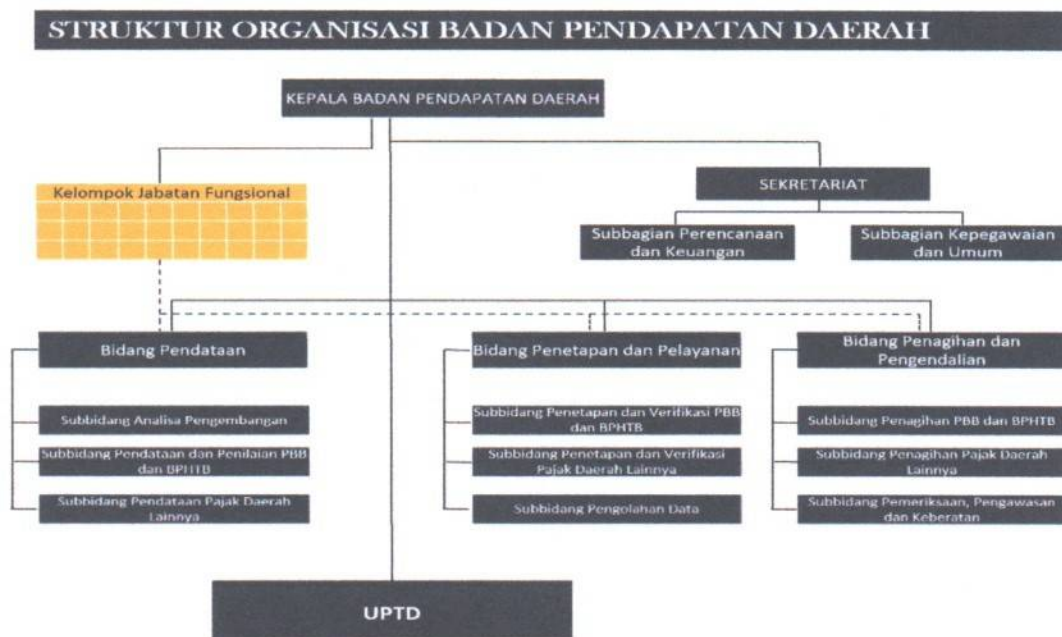
- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penagihan pajak daerah lainnya; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penagihan pajak daerah lainnya.

Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan

pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pemeriksaan, Pengawasan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan; dan
- c) pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemeriksaan, pengawasan dan keberatan.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA KBB



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke-2 atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagaimana telah mengganti undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan DOB;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RPD 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pendanaan Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ke 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang



- rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, tambahan lembaran daerah Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 (lembaran daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 No 2 Seri E Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1;
 20. Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 14);
 22. Peraturan Bupati No. 81 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026;
 24. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 Tentang RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9);
 26. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 41).
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor);dan
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mencapai kesinambungan dalam pencapaian sasaran kinerja bidang Pendapatan Tahun 2025 secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan sistem, untuk memenuhi kepentingan Pemerintahan Daerah secara optimal.
2. Merancang kinerja agar terciptanya konsistensi, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja di akhir tahun anggaran perencanaan.
3. Mencapai Harmonisasi pada perubahan perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TA 2025

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPENDA
- 2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
- 2.4 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG BARAT
- 2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN



MASYARAKAT

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN 2025 HINGGA TRIWULAN II

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat 2025 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (Tiga) Bulan tersisa tahun anggaran 2025, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan akan dilaksanakan dalam mengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat periode 2025-2029. Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar Program/Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan diantaranya Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Berbicara tentang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Barat salah satu penyumbang Pendapatan Daerah, TA. 2025 (APBD Murni) sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Daerah **Rp.3.364.314.144.635,-** Target Pajak Daerah **Rp.741.518.755.652,-** atau sebesar **22,04%** dari Pendapatan Daerah Kab. Bandung Barat.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp. 952.021.711.556,-** Target Pajak Daerah **Rp.741.518.755.652,-** atau sebesar **77,89%** dari Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung Barat.

Untuk penjelasan lebih rincinya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini yang menjelaskan Pendapatan Daerah yang terakomodir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat selama lebih dari 10 tahun dimulai pada tanggal 1 januari 2013 hingga 17 September 2025

TAHUN Anggaran	TARGET (Rp.)	JUMLAH PENERIMAAN / REALISASI PAJAK DAERAH (Rp.)	PRESENTASE (%)	LEBIH/KURANG REALISASI PAJAK DAERAH (Rp.)	KETERANGAN
2013	135.885.000.000	153.764.055.782	113,16	17.879.055.782	Surplus
2014	174.825.000.000	169.333.416.634	96,86	(5.491.583.366)	Minus
2015	205.146.000.000	217.833.359.547	106,18	12.687.359.547	Surplus
2016	237.460.000.000	263.939.808.206	111,15	26.479.808.206	Surplus
2017	263.260.000.000	336.515.620.557	127,83	73.255.620.557	Surplus
2018	276.489.808.000	306.237.634.441	110,76	29.747.826.441	Surplus
2019	450.000.000.000	379.096.936.256	84,24	(70.903.063.744)	Minus
2020	255.145.000.000	330.898.929.358	129,69	75.753.929.358	Surplus
2021	463.286.834.221	375.290.291.048	81,01	(87.996.543.173)	Minus
2022	480.000.000.000	495.815.214.282	103,29	15.815.214.282	Surplus
2023	549.000.000.000	508.940.718.263	92,70	(40.059.281.737)	Minus
2024	571.000.000.000	90.255.003.477	103,37	19.255.003.477	Surplus
2025	741.518.755.652	548.938.891.601	73,63	(192.579.864.051)	
(Sampai dengan 17 September 2025)					

No.	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp.)	Realisasi Penerimaan (Rp.) s/d. 30 Juni 2025	%	Lebih/Kurang Target Tw III (40%)
1	PBJT- Jasa Perhotelan	40.000.000.000	23.216.819.738	58,04	(6.783.180.262)
2	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	73.000.000.000	48.760.867.604	66,80	(5.989.132.396)
3	PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	15.000.000.000	14.856.816.255	99,05	3.606.816.255
4	Reklame	5.000.000.000	3.723.801.036	74,48	(26.198.964)
5	PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik	82.000.000.000	57.248.287.163	69,81	(4.251.712.837)
6	PBJT - Jasa Parkir	7.000.000.000	993.108.815	14,19	(4.256.891.185)
7	Air Tanah	42.000.000.000	24.161.807.444	57,53	(7.338.192.556)
8	Mineral Bukan Logam & Batuan	3.000.000.000	2.123.720.375	70,79	(126.279.625)
9	PBB	120.000.000.000	113.392.178.027	94,49	23.392.178.027
10	BPHTB	190.000.000.000	146.446.463.844	77,08	3.946.463.844
11	Opsen PKB	100.721.111.227	77.906.997.100	77,35	2.366.163.680
12	Opsen BBNKB	63.797.644.425	36.108.024.200	56,60	(11.740.209.119)
JUMLAH (s/d. 17 September 2025)		741.518.755.652	548.938.891.601	73,63	(7.200.175.138)



2.1.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan 2025 hingga Triwulan II, pelaksanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dalam mengakomodir Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendapatan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

- A. **Belanja Tidak Langsung** sampai dengan Bulan Desember 2024 dialokasikan sebesar **Rp. 25.829.908.271,00** dan terealisasi sebesar **Rp.24.286.446.724,00 (94,02%)**. Rata rata tingkat capaian kinerja berada pada angka **91,40%**.
- B. **Belanja Langsung** Perangkat Daerah Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp.7.345.989.600 00**. yang dialokasikan untuk pelaksanaan 1 (Satu) Program, 1 (Satu) kegiatan dan 14 (Empat Belas) sub kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata **87,36%** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.216.668.926,00 (98,24%)**, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:



TABEL 2.1

REALISASI DAN TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN DAN KINERJA T.A 2024

BAPENDA KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Bapenda			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran DPA Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		
		Target Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dievaluasi				Kinerja	Pagu	
		Kinerja	Satuan	Pagu	Kinerja			Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			33.175.897.871		31.503.115.650	89,38	94,96
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	25.829.908.271		24.286.446.724	91,40	94,02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	143.944.500		142.388.000	100,00	98,92
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	6.103.000	1	6.029.000	100,00	98,79
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.104.700	1	5.463.300	100,00	89,49
3	Koordinasi dan Pennyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.248.000	1	3.213.000	100,00	98,92
4	Koordinasi dan Pennyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	60.082.800	1	59.875.200	100,00	99,65
5	Koordinasi dan Pennyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	60.312.800	1	60.080.400	100,00	99,61
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	5.762.800	2	5.636.700	100,00	97,81
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	2.330.400	3	2.090.400	100,00	89,70
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	23.509.670.171		22.163.870.801	61,11	94,28
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	23.376.695.571	12	22.038.653.601	100,00	94,28



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Bapenda			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran DPA Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
		Target Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dievaluasi						
		Kinerja	Satuan	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	52.947.700	1	45.336.600	100,00	85,63
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	7.503.600	0	7.357.300	-	98,05
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	72.523.300	8	72.523.300	44,44	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	108.127.500		98.777.500	100,00	91,35
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Dokumen	20.202.500	1	20.177.500	100,00	99,88
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Dokumen	87.925.000	1	78.600.000	100,00	89,39
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	851.805.000		765.934.175	100,00	89,92
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Jenis	8.150.300	4	8.137.200	100,00	99,84
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Jenis	193.305.800	4	192.486.300	100,00	99,58
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	Jenis	28.701.500	6	28.603.400	100,00	99,66
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120	Jenis	61.530.400	120	58.896.500	100,00	95,72
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40	Jenis	115.223.000	40	52.514.000	100,00	45,58
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Bapenda			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran DPA Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
		Target Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dievaluasi						
		Kinerja	Satuan	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Kali	13.000.000	24	12.590.000	100,00	96,85
22	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi	3	kegiatan	431.894.000	3	412.706.775	100,00	95,56
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	281.208.800		232.995.400	100,00	82,85
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jenis	62.555.800	1	62.299.200	100,00	99,59
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jenis	218.653.000	1	170.696.200	100,00	78,07
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	935.152.300		882.480.848	87,32	94,37
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	46	Unit	264.226.500	40	229.005.416	86,96	86,67
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	Unit	78.210.000	5	74.366.300	100,00	95,09
28	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Gedung	592.715.800	3	579.109.132	75,00	97,70
2	Program Pengelolaan PendapaTan Daerah	100	%	7.345.989.600		7.216.668.926	87,36	98,24
7	Kegiatan Pengeloaan Pendapatan Daerah	100	%	7.345.989.600		7.216.668.926	87,36	98,24
29	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	10	Jenis	165.421.400	8,00	159.548.810	80,00	96,45
30	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	507.228.700	4,00	503.559.000	100,00	99,28



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Bapenda			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran DPA Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
		Target Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dievaluasi						
		Kinerja	Satuan	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	Kegiatan	462.930.000	3,00	451.145.440	100,00	97,45
32	Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengelolaan Pajak daerah	4	Jenis	871.196.900	4,00	867.663.448	100,00	99,59
33	Pendataan dan Pendataran Objek Pajak daerah	8	Kegiatan	724.801.700	8,00	715.104.105	100,00	98,66
34	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Kegiatan	118.700.000	3,00	117.998.950	100,00	99,41
35	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta bea perolehan hak atas bangunan (BPHTB)	2	Kegiatan	505.033.500	2,00	501.431.625	100,00	99,29
36	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1	Kegiatan	518.694.300	1,00	505.663.150	100,00	97,49
37	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	10	Jenis	563.121.600	10,00	542.133.100	100,00	96,27
38	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10	Jenis	686.828.100	10,00	649.542.271	100,00	94,57
39	Penagihan Pajak Daerah	10	Jenis	1.549.290.500	10,00	1.534.731.815	100,00	99,06
40	Penyesaian Keberatan Pajak Daerah	10	Jenis	12.627.000	3,00	12.574.200	30,00	99,58
41	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10	Jenis	522.583.000	7,50	519.465.810	75,00	99,40
42	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	21	Jenis	137.532.900	8,00	136.107.202	38,10	98,96

SUMBER : HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA (2024)

Dari tabel diatas yang menjelaskan realisasi pada tahun anggaran 2024 terlihat ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana. Lebih tepatnya ada 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan disesuaikan dengan kondisi pada



daerah saat itu meskipun sudah teranggarkan baik dalam perencanaan. Sub kegiatan itu adalah :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.1.2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Hingga Triwulan II

Sedangkan pada tahun anggaran 2025 Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 hingga Triwulan II, pelaksanaan Kinerja dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

- A. Belanja Tidak Langsung** sampai dengan Bulan Juni 2025 dialokasikan sebesar **Rp.26.692.977.983,00** dan terealisasi sebesar **Rp.6.865.826.524,00 (25,72%)**. Rata rata tingkat capaian kinerja berada pada angka **33,12%**.
- B. Belanja Langsung** Perangkat Daerah Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp.7.929.869.978,00** dan terealisasi hingga triwulan II Sebesar **Rp. 1.672.135.878,00** yang dialokasikan untuk pelaksanaan **1 (Satu)** Program, **1 (Satu)** kegiatan dan **14 (Empat Belas)** sub kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata **29,17%** yang akan terlihat pada tabel dibawah ini :



TABEL 2.2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD HINGGA
TRWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah		18	%		9,13	1.672.135.878	50,72	21,09
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah	100,00	%	7.929.869.978		1.672.135.878		21,09
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	%	7.929.869.978		1.672.135.878		21,09
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10,00	Objek Pajak	116.199.000	5,00	49.544.504	50,00	42,64
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4,00	Dokumen	371.448.200	2,00	55.100.000	50,00	14,83
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3,00	Objek Pajak	96.376.100	-	-	-	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4,00	Paket	536.246.500	2,00	2.600.000	50,00	0,48
Pendataan dan Pendataran Objek Pajak daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8,00	Dokumen	704.185.500	2,00	237.671.600	25,00	33,75
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3,00	Objek Pajak	92.676.000	1,00	28.420.360	33,33	30,67
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta bea perolehan hak atas bangunan (BPHTB)	Terpenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2,00	Dokumen	359.196.450,00	1,00	60.800.000	50,00	16,93
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1,00	Objek Pajak	206.044.500	-	46.494.700	-	22,57
Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10,00	Objek Pajak	574.101.000	3,00	183.972.225	30,00	32,05
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10,00	Objek Pajak	333.342.800	3,00	139.579.900	30,00	41,87



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	10,00	Objek Pajak	929.585.000	3,00	526.859.288	30,00	56,68
Penyesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10,00	Objek Pajak	64.913.000	3,00	14.400.000	30,00	22,18
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10,00	Objek Pajak	3.529.315.928	3,00	326.693.301	30,00	9,26
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	21,00	Jenis Retribusi Daerah	16.240.000	-	-	0	0
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							29,17	21,09
Predikat kinerja							SR	SR
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)							29,17	21,09
Predikat kinerja							SR	SR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas tata kelola urusan pemerintahan Bidang Keuangan	100,00	Persen	26.692.977.983		6.865.826.524		25,72
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100	Persen	220.507.200		38.164.300		17,31
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	81.517.300	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.173.900	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.924.600	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	53.598.000	1,00	11.195.600	100,00	20,89



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	55.333.500	1,00	16.904.800	100,00	30,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	6.920.700	1,00	5.073.700	50,00	73,31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	7.039.200	1,00	4.990.200	33,33	70,89
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							40,48	17,31
Predikat kinerja							SR	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100	Persen	24.306.559.371		6.270.154.056		25,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	24.171.478.721	6,00	6.192.573.856	50,00	25,62
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	36.356.650	1,00	22.251.300	100,00	61,20
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	9.747.500	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	88.976.500	-	55.328.900	-	62,18
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							37,50	25,80
Predikat kinerja							SR	SR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	100	Persen	211.050.000		-		-



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	60.000.000	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	151.050.000				
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							-	0,00
Predikat kinerja							SR	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	729.227.500		139.063.231		19,07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Jenis	12.776.400	1,00	2.094.000	25,00	16,39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Jenis	284.411.500	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6	Jenis	19.112.200	1,00	2.911.731	16,67	15,23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	120	Jenis	46.711.100	60,00	27.680.500	50,00	59,26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	40	Jenis	101.296.500	10,00	21.465.000	25,00	21,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jenis	100.000.000	-	50.000.000	-	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Orang	28.600.000	12,00	3.575.000	50,00	12,50
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	kegiatan	125.612.000	2,00	31.337.000	25,00	24,95
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		5	Dokumen	10.707.800	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							21,30	19,07



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	55.333.500	1,00	16.904.800	100,00	30,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	6.920.700	1,00	5.073.700	50,00	73,31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	7.039.200	1,00	4.990.200	33,33	70,89
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							40,48	17,31
Predikat kinerja							SR	SR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100	Persen	24.306.559.371		6.270.154.056		25,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	24.171.478.721	6,00	6.192.573.856	50,00	25,62
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	36.356.650	1,00	22.251.300	100,00	61,20
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	9.747.500	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	88.976.500	-	55.328.900	-	62,18
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							37,50	25,80
Predikat kinerja							SR	SR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	100	Persen	211.050.000		-		-



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	60.000.000	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	151.050.000				
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							-	0,00
Predikat kinerja							SR	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	729.227.500		139.063.231		19,07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Jenis	12.776.400	1,00	2.094.000	25,00	16,39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Jenis	284.411.500	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6	Jenis	19.112.200	1,00	2.911.731	16,67	15,23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	120	Jenis	46.711.100	60,00	27.680.500	50,00	59,26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	40	Jenis	101.296.500	10,00	21.465.000	25,00	21,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jenis	100.000.000	-	50.000.000	-	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Orang	28.600.000	12,00	3.575.000	50,00	12,50
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	kegiatan	125.612.000	2,00	31.337.000	25,00	24,95
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		5	Dokumen	10.707.800	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							21,30	19,07



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3			4		5	
Predikat kinerja							SR	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	100	Persen	134.521.700		133.360.950		99,14
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1	Unit	134.521.700	1,00	133.360.950	100,00	99,14
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							100,00	99,14
Predikat kinerja							ST	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	100	Persen	250.668.450		91.707.800		36,59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jenis	55.015.400	-	22.513.400	-	40,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jenis	195.653.050	-	69.194.400	-	35,37
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)							-	36,59
Predikat kinerja							SR	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	840.443.762		193.376.187		23,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46	Unit	237.497.000	15,00	66.230.237	32,61	27,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	Unit	167.200.000	2,00	67.145.950	40,00	40,16
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhab	4	Gedung	435.746.762	1,00	60.000.000	25,00	13,77



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2025 TW II (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya							
Rata-Rata Capaian kinerja kegiatan (%)						32,54	17,31
Predikat kinerja						SR	SR
Rata-rata capaian Kinerja Program (%)						33,12	25,72
Predikat kinerja						SR	SR

SUMBER : EVALUASI RENJA BAPENDA 2025

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025 hingga TW II terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan tersebut dijelaskan dan di mapping sesuai program dan dijelaskan sebagai berikut ini :

TABEL 2.3
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM	FAKTOR PENGHAMBAT
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap sakis, keberhasilan implementasi sakis idealnya didukung oleh pemahaman seluruh pegawai; 2. Komitmen sebagian pegawai Badan Pendapatan Daerah implementasi sakis masih belum tinggi.
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam bidang perpajakan dan pengelolaan data. 2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis

SUMBER : EVALUASI RENJA BAPENDA KBB(2025)

Pelaksanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat hingga Triwulan II Tahun 2025, secara umum masih belum menghasilkan capaian kinerja yang signifikan jika dilihat dari output dan realisasi anggaran. Hal ini dapat dikatakan cukup wajar jika dilihat cara historikal dimana pada triwulan pertama pelaksanaan kegiatan belum terlalu masif dan masih pada tahap persiapan/orientasi

kinerja. Demikian dalam hal ini, Bapenda di Kabupaten Bandung Barat perlu menentukan target kinerja pada setiap triwulan berdasarkan skala prioritas dan perhitungan tertentu. Berdasarkan hasil analisis data pada Laporan Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah yang telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Tim Pengendalian dan Evaluasi menemukan beberapa permasalahan umum pada pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2025. Demikian dalam perkembangannya, permasalahan sebagaimana dimaksud lebih banyak menyangkut tentang substansi dokumen perencanaan daripada tentang capaian kinerja. Adapun permasalahan umum sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan dalam rangkuman sebagaimana dibawah ini.

1. Adanya inkonsistensi sub kegiatan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Hal ini dapat dilihat dari banyak ditemukannya sub kegiatan dalam dokumen perencanaan namun tidak digunakan pada saat penyusunan APBD Badan Pendapatan Daerah
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang notabennya memuat informasi target pelaksanaan kinerja bulanan/triwulanan, eksistensinya tidak terlalu dianggap penting dimana hanya sebatas formalitas. Sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang berjalan tidak konsisten dengan penjadwalan sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
3. Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak efektif dan cenderung mengalami reorientasi sebagai akibat dari agenda perubahan perencanaan Tahun 2025 yang mengacu pada Ranwal RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, secara langsung berdampak pada pembatasan pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan.

Berdasarkan **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3** sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa secara rata-rata capaian kinerja seluruh urusan masih berada pada kategori “Sangat Rendah” dengan rata-rata capaian sebesar 31,14%. Sementara untuk

realisasi anggaran juga berada pada kategori “Sangat Rendah” dengan rata-rata realisasi sebesar 23,40% terhadap pagu APBD.

2.2 ANALISIS KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berupa Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel seperti yang tertera dalam tujuan RPD 2024-2026 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik disamping untuk menunjang *good government*.

Pada periode akhir tahun perencanaan 2021-2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat mempunyai Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah yang ditopang oleh Indikator yang menjadi IKU Persentase Peningkatan PAD dalam mengakomodir Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam mengampu Non Urusan atau Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator Nilai Sakip Bapenda dengan realisasi sebagai Berikut ini :

1. Sasaran **Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien** dengan indikator Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2023 mempunyai target 8,62% dengan realisasi sebesar 10,86% atau tingkat capaian sebesar 125,99%. Sasaran tersebut ditopang dengan Pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.7.993.827.000 terealisasi sebesar Rp.7.612.686.777 atau dengan tingkat capaian anggaran sebesar 95,23%
2. Sedangkan Pada Sasaran **Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien** dengan indikator Nilai Sakip Bapenda mempunyai target kinerja nilai mutu B dengan realisasi B atau dengan tingkat capaian 100% dalam mengakomodir unsur penunjang urusan pemerintahan daerah. Pagu yang dimiliki sebesar Rp. 24.403.910.179 dengan realisasi sebesar Rp. 22.326.036.343 atau dengan tingkat capaian anggaran sebesar 91,49%.

Pada akhir tahun perencanaan Renstra 2024-2026 Bapenda Kabupaten Bandung Barat mengampu 2 Sasaran yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah** dengan indikator Nilai Sakip Bapenda dan **Terkelolanya**

Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel dengan indikator Prosentase Peningkatan PAD dari sektor pajak daerah yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. **Nilai Sakip Bapenda** pada tahun 2024 mempunyai target kinerja Nilai Mutu (68,55) atau B dengan realisasi kinerja Nilai Sakip Bapenda sebesar (69,80) atau dengan Klasifikasi B. Mempunyai tingkat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut ditopang oleh pagu sebesar Rp.26.692.977.983 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.865.826.524 atau tingkat capaian anggaran sebesar 25,72%.
2. Sementara pada tahun anggaran 2025 hingga Triwulan II berjalan **Indikator Sasaran Prosentase Peningkatan PAD** memiliki pagu sebesar Rp.7.929.869.978 dengan realisasi hingga triwulan II sebesar Rp.1.672.135.878 atau tingkat capaian anggaran sebesar 21,09% . Rata-Rata kinerja berada pada angka 29,17% selama tahun 2025 hingga triwulan II.

Untuk lebih jelasnya Berikut adalah tabel 2.4 yang menjelaskan tentang target capaian kinerja dalam periode renstra 2024-2026 yang dikaitkan dengan indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan dasar Penyusunan Renja Perubahan tahun 2025.

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1			Nilai Sakip Pemda	70 / B	72 / BB	75 / BB		72 / BB	75 / BB
2	Nilai Sakip Bapenda			68,55	68,61	68,71	69,8	68,61	68,71
3			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase peningkatan pajak daerah			3%	5%	5%	15,98%	5%	5%

SUMBER : TABEL TC 30 EVALUASI RENJA BAPENDA KBB

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA KBB

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Menerapkan Penjenjangan Kinerja sesuai apa yang diatur dalam aturan yang tertera dalam Permenpan RB 89 dan Permendagri 86 untuk mengarahkan seluruh SDM dalam mengejar target Individu ataupun Target Perangkat Daerah hingga Target capaian Pembangunan Daerah;
2. Menghasilkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan harus dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Menerapkan *Right Man On The Right Place* Dalam Penempatan SDM. Terlebih sudah banyaknya jabatan fungsional yang membuat jabatan lebih fleksibel

dalam mengejar target Indikator Kinerja Utama Bapenda Maupun IKU nya Bidang. Hal ini Berdampak Pada Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan, Mengingat SDM yang Dimiliki Lebih Responsive Terhadap Perkembangan Kebijakan Provinsi dan Nasional serta Menghasilkan Perencanaan Yang Akuntabel baik bagi Badan ataupun kontribusi Badan bagi pembangunan daerah;

4. Membuat *ROADMAP* untuk kegiatan yang berdasarkan dari perencanaan entah itu dalam bentuk KAK ataupun sebuah dokumen yang menjadi *Guidance* pelaksanaan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Barat dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RKPD 2025

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil analisis Kebutuhan			
	IKS/PROGRAM	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	IKS/PROGRAM	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	5	6	7	8	10	11
I	Nilai Sakip Bapenda		68,61/ (B)	26,944,283,983	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bapenda		81,58	27.218.404.415
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	68,61/ (B)	26,944,283,983	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung Barat	81,58	27.218.404.415
II	Prosentase Peningkatan PAD dari sektor pajak daerah		3%	8.927.116.928	Persentase peningkatan PAD		5 %	11.736.173.178
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		5%	
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Bandung Barat	3%	8.927.116.928	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Bandung Barat	100%	11.736.173.178

SUMBER : TABEL TC 31 EVALUASI RENJA BAPENDA KBB (2025)

2.5 PENELAAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah akan mengakomodir usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan urusan wajib, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah tingkat Kabupaten yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan pengumpulan hasil informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Berikut adalah tabel usulan Program dan Kegiatan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan tahun 2026 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat :

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK PIKIRAN DPRD DAN
ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT T.A 2025

NO	USULAN	PENGUSUL/LEMBAGA	ALAMAT	PAGU	PENGUSUL	DEWAN
1	NIHIL					

**SUMBER : DAFTAR CPCL POKOK PIKIRAN (POKIR) PERUBAHAN
BAPENDA 2025**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN BAPENDA KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari :

1. **Mengevaluasi Keselarasan** : Memastikan bahwa target dan program Bapenda sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.
2. **Menilai Kinerja** : Mengukur efektivitas Bapenda dalam meningkatkan pendapatan daerah dan sektor-sektor potensial untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
3. **Meningkatkan Akuntabilitas** : Memastikan Bapenda dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
4. **Mengidentifikasi Tantangan dan Peluang** : Menemukan hambatan dalam pencapaian target dan peluang untuk inovasi dan perbaikan program kerja Bapenda.

Sejalan dengan hal tersebut Renja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam peningkatan kualitas SDM aparatur negara, termasuk peningkatan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme, menjadi pedoman dalam efisiensi birokrasi, melalui perbaikan sistem administrasi, digitalisasi, dan peningkatan pelayanan publik, Selain itu, dokumen ini akan mendorong reformasi birokrasi yang komprehensif, termasuk perbaikan tata pemerintahan, transparansi, dan

akuntabilitas. Dokumen ini mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN, dengan Tujuan Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Berdampak, Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme ASN, Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Inklusif, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital, dan Penyederhanaan Regulasi dan Struktur Organisasi. Visi Nasional yang mengacu pada RPJPN 2025–2045 & RPJMN 2025–2029) **"Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"**.

Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu "Terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia yang Profesional, Adaptif, Digital, dan Berdampak". Misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, transparan, dan akuntabel.
2. Memperkuat reformasi birokrasi tematik berbasis hasil.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif.
4. Mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan.
5. Mengembangkan SDM aparatur berbasis kompetensi, nilai dasar ASN, dan sistem merit.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan lima Tujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat;
2. ASN yang profesional dan adaptif terhadap perubahan;
3. Pelayanan publik yang prima dan terintegrasi;
4. Tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi;
5. Regulasi yang sederhana, efisien, dan tidak tumpang tindih

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional yaitu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Pengungkit Sektor Pendidikan dan SDM Unggul, Kontributor Ketahanan Pangan Nasional, Model Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi, Pengungkit Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional, dan Penguatan Ketahanan Sosial dan Lingkungan, dengan visi "Jawa Barat Unggul, Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan". Isu-isu strategis Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Ketimpangan antarwilayah (utara lebih maju dibanding selatan);
2. Urbanisasi tinggi dan tekanan terhadap infrastruktur dasar;
3. Ketergantungan ekonomi pada industri manufaktur padat karya;
4. Ancaman bencana (banjir, longsor, kekeringan);
5. Masalah lingkungan dan keterbatasan ruang terbuka hijau;
6. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, terutama usia muda;
7. Belum meratanya akses layanan pendidikan dan Kesehatan.

Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing;
2. Mendorong transformasi ekonomi hijau dan kreatif berbasis potensi lokal;
3. Memperkuat pembangunan wilayah yang berkeadilan dan merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan digital;
5. Menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana;
6. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat Jawa Barat.

Tujuan strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025–2029 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah, meningkatkan ketahanan sosial dan lingkungan, serta mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, inovatif, dan berbasis digital guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin melalui

penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, ketahanan lingkungan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kemandirian fiskal, selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan berkelanjutan.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, telah dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 yaitu, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif di Kabupaten Bandung Barat tentunya tujuan Bapenda sendiri mempunyai tujuan Meningkatnya Tata Kelola keuangan yang Akuntabel, Transparan dalam menunjang tujuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat tersebut.

Sasaran tersebut mengacu kepada Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan beserta indikator yang mendampingi adalah Persentase peningkatan PAD dan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

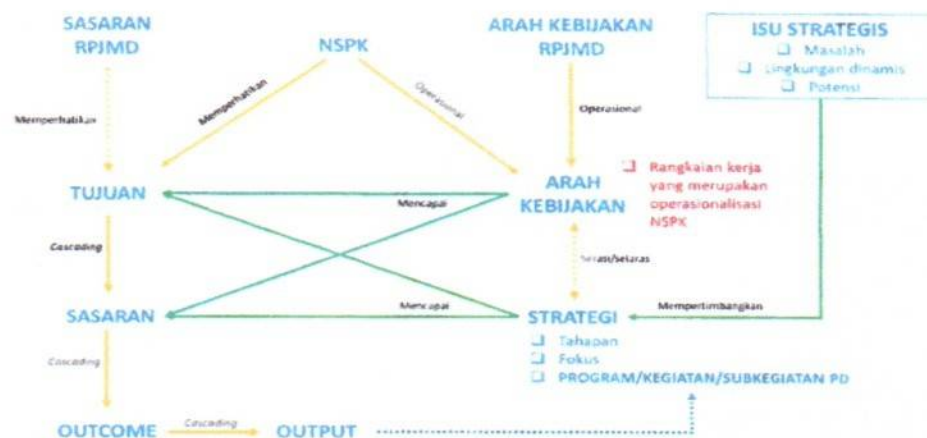
Berkat rumusan Tujuan dan Sasaran diatas beserta indikator nya maka terbentuklah sasaran strategis bagi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk menjalankan fungsinya yaitu

- 1) Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
- 2) Perencanaan kinerja yang kuat beserta pengukuran kinerja yang akurat, pelaporan yang transparan dan evaluasi yang efektif dengan indikator Kinerja yang menyebutkan
 - a) Persentase Peningkatan PAD
 - b) Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Sebagai bentuk perwujudan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan

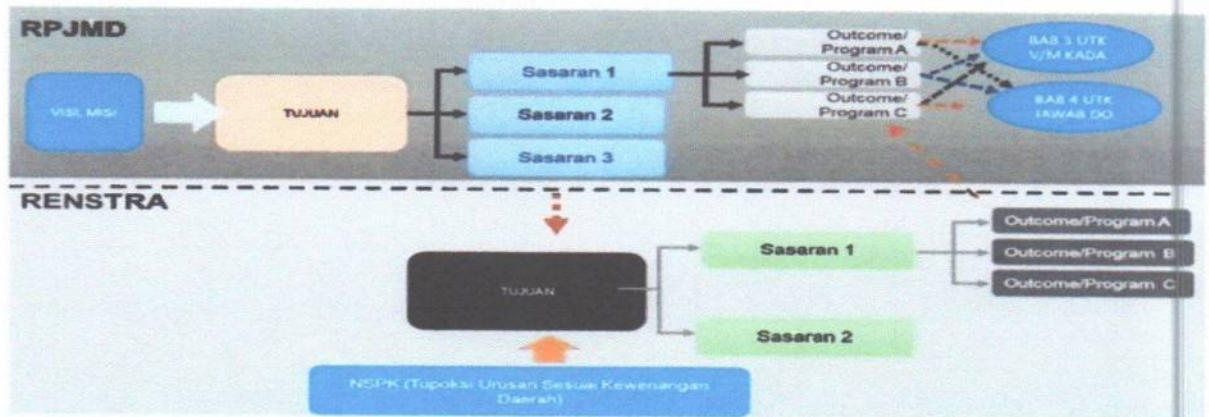
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Sebagai gambaran Konsep Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

GAMBAR 3.1
KONSEP PERENCANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Selain Perencanaan yang telah terkonsep oleh Bapenda dapat tergambar dalam kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar Berikut ini.

GAMBAR 3.2
KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH



SUMBER : INMENDAGRI 2 TAHUN 2025

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat serta indikator-indikator pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPENDA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
NSPK:										
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola keuangan yang Akuntabel, Transparan		IRB BAPENDA	80,77	81,58	82,41	83,27	84,17	85,12	86,13
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian NSPK, yang merupakan bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional.			Persentase peningkatan PAD	3	5	5	5	5	5	5
SASARAN RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	N/a	5	5	5	5	5	5

SUMBER : BAPENDA 2025

Fungsi dari berdirinya Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bandung Barat adalah dalam mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Keterkaitan PAD dengan Pendapatan Daerah. Secara Rinci Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah mempunyai Rincian masing-masing yang akan dijelaskan sebagai Berikut :

– **Pendapatan Asli Daerah (PAD) :**

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. **Retribusi Jasa Usaha**
 - c. **Retribusi Perizinan Tertentu**
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**
 - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
 - b. Pendapatan Bunga dan Jasa Giro
 - c. Keuntungan Selisih Nilai Tukar
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi

– **Pendapatan Daerah**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Pendapatan Transfer

- a. Dana Perimbangan
- b. Dana Transfer Antar Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. **Hibah:** Pemberian sukarela dari pihak lain (pemerintah, badan usaha, atau masyarakat).
- b. **Dana Darurat:** Dana yang disediakan untuk kebutuhan mendesak atau bencana.

- c. **Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan:** Penerimaan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Mendukung Reformasi Birokrasi, IKK adalah bagian penting dari program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada masyarakat. Sebagai Bahan Pertimbangan Program dan Anggaran, IKK menjadi dasar dalam menyusun program kerja dan alokasi anggaran agar lebih efektif dan efisien dalam mengampu unsur Pendapatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada periode 2025-2029 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta Formulasi rumus dalam mencapai target yang akan dijelaskan sebagai Berikut :

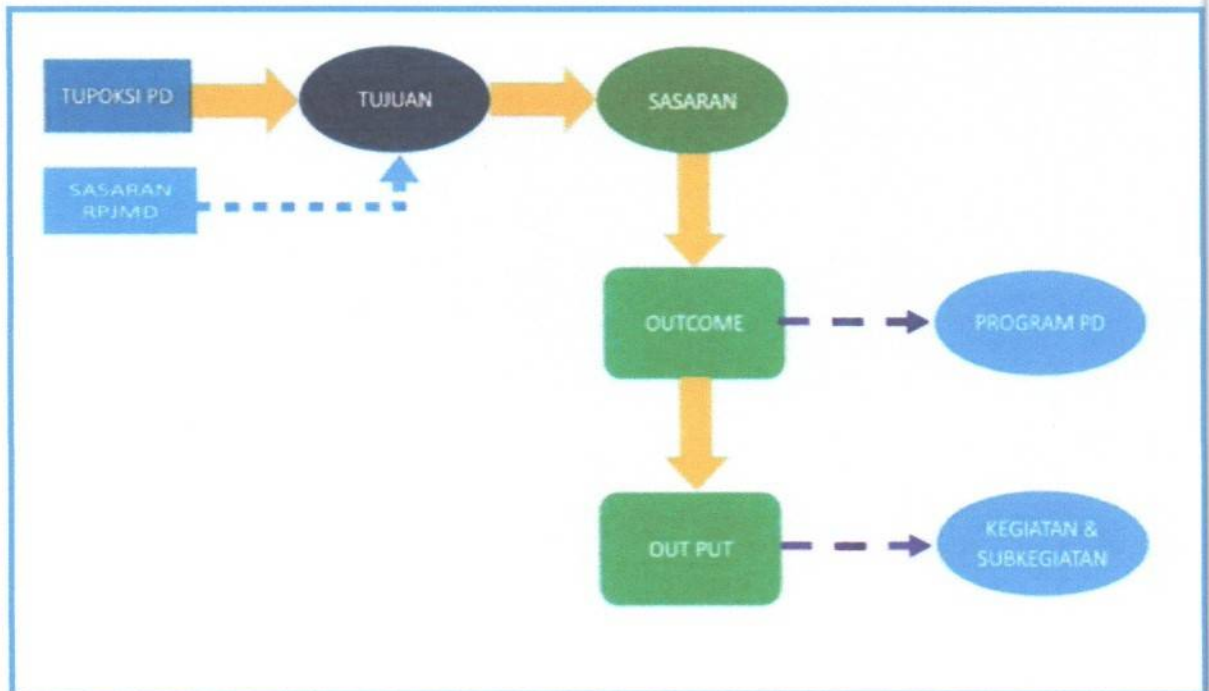
- **INDIKATOR KINERJA KUNCI** : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
- **FORMULASI** : Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah x 100%

3.4 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPENDA PADA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2025

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 900.1.15.5-3406_Tahun_2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Badan Pendapatan Daerah telah dirumuskan ke dalam 1 (satu) program unsur penunjang urusan pemerintahan (urusan keuangan), yakni “Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”. Selain program unsur penunjang urusan pemerintahan tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah juga telah dirumuskan ke dalam 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah, yakni “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bandung Barat Perubahan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini yang menjadi Perumusan pada tabel yang akan terlampir.

GAMBAR 3.3
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



SUMBER : INMENDAGRI 2 TAHUN 2025



TABEL 3.2
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DADAN PENDAL ATAN DAERKAT KADOLATEN DANDONG DAERY						
NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
NSPK:	Tujuan 33 : Meningkatkan Tata Kelola keuangan yang Akuntabel, Transparan					
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian NSPK, yang merupakan bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional.			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Persentase peningkatan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	
				Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Peningkatan capaian realisasi pajak daerah	Persentase capaian realisasi Pajak Daerah
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif				Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
				Tertelaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah
				Tertelaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta bea perolehan hak atas bangunan (BPHTB)
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah
				Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tertaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
				Tertaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
				Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Tertaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Bapenda	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah aspek administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Rata-rata nilai SKP pegawai perangkat daerah atau persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Tertelaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				BMD yang terpelihara	Persentase BMD dalam kondisi baik	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
				Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhab	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhab	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SUMBER : BAPENDA 2025



Sementara Mengacu pada tujuan, sasaran, dan tahapan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya menentukan langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu 1 tahun yang disertai target dan pagu indikatif. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Berikut adalah tabel rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju ke tahun anggaran 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

TABEL 3.3

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							
1				4	5	6	7	8	9	10	11				
			Badan Pendapatan Daerah				32.768.728.583	34.570.977.961	34.570.977.961			15.281.400,00			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				32.768.728.583	34.570.977.961	34.570.977.961			15.281.400,00			
5	02		KEUANGAN				32.768.728.583	34.570.977.961	38.954.577.593			15.281.400,00			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	26.951.682.383	26.641.107.983	27.218.404.415				15.281.400,00			
5	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	220.507.200	220.507.200	156.025.600	Reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan melalui Smart Governance			15.281.400,00			
5	02	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0	81.517.300	81.517.300	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		15.281.400,00
5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	8.173.900	8.173.900	8.173.900	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	55.333.500	55.333.500	24.777.600	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.920.700	6.920.700	6.920.700	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.039.200	7.039.200	7.039.200	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	36.356.650	36.356.650	40.514.200	-		0,00
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.747.500	9.747.500	9.747.500	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	0	88.976.500	97.291.600	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01			298.210.000	298.210.000	199.303.600	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01								
5	02	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							



BADAN PE



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	884.621.900	893.373.500	1.260.992.800	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.776.400	12.776.400	12.776.400	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	1	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
				4	5	6	7	8		10	11
			3	1 Paket	1 Paket	275.659.900	284.411.500	734.116.200	Daerah		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
				1 Paket	1 Paket	19.112.200	19.112.200	19.112.200	Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								
5	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
				1 Paket	1 Paket	46.711.100	46.711.100	95.282.200	Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
5	02	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	101.296.500	49.426.500	57.948.000	Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	148.000.000	100.000.000	100.000.000	Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	0	28.600.000	28.600.000	-		0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
										4	5	6
1	2	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
5	02	01		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	0	125.612.000	202.450.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.707.800	10.707.800	10.707.800	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	134.521.700	134.521.700	134.521.700	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			1 Unit	1 Unit	0	0	0	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
			7 Unit	7 Unit	134.521.700	134.521.700	134.521.700	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			3 Unit	3 Unit	0	0	0	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
5 02 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			263.868.450	250.668.450	307.068.600	Reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01 2.08										
5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	55.015.400	55.015.400	62.327.800	Reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	02	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	208.853.050	195.653.050	244.740.800	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.09		-	-	843.393.762	840.443.762	957.643.762	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	50 Unit	244.997.000	237.497.000	261.497.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit	162.650.000	167.200.000	232.500.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	435.746.762	435.746.762	463.646.762	Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	Reformasi birokrasi dan transpormasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5	02	04			5.817.046.200	7.929.869.978	11.736.173.178			0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			4	5	6	7	8	Daerah	10	11
1		3								
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	5.817.046.200	8.927.116.928	11.736.173.178	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 04 2.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	116.199.000	116.199.000	116.199.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 04 2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
5 02 04 2.01										

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Setelah	RKPD 2025			
					Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103 Unit	103 Unit	536.246.500	536.246.500	738.746.500	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance				
5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	704.185.500	704.185.500	809.331.700	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance			0,00	
5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	110.170.000	92.676.000	192.396.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 04 2.01 0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25 Obyek Pajak	25 Obyek Pajak	519.504.300	359.196.450	1.941.320.450	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 04 2.01 0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah								
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	323.993.000	206.044.500	612.581.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02 04 2.01 0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
			4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Layanan	10 Layanan	583.910.000	574.101.000	612.340.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance			0,00
5 02 04 2.01 0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	8 Dokumen	341.841.000	333.342.800	447.847.300	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance			0,00
5 02 04 2.01 0011		Penagihan Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	900.727.700	929.585.000	1.435.285.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance			0,00
5 02 04 2.01 0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	77.600.000	64.913.000	64.913.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02	04	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	741.287.000	3.529.315.928	3.580.615.928	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
5 02	04									
5 02	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	21 Laporan	21 Laporan	16.240.000	16.240.000	216.240.000	Reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan melalui Smart Governance		0,00
			J U M L A H		32.768.728.583	34.570.977.961	38.954.577.593			15.281.400,00

SUMBER : TABEL RENJA SIPD RI 2025-2026 BAPENDA (DI-OLAH)



BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TA 2025

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Pada Perubahan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA PENDANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Setelah Perubahan	(Berkurang) /Bertambah
1	2	3	4	5=4-3
02	KEUANGAN	34.570.977.961,00	38.954.577.593,00	2.499.965.200,00
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.641.107.983,00	27.218.404.415,00	432.289.300,00
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.507.200,00	156.025.600,00	-
001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.517.300,00	81.517.300,00	-
002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.173.900,00	8.173.900,00	-
003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.924.600,00	7.924.600,00	-
004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	53.598.000,00	19.672.300,00	-
005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	55.333.500,00	24.777.600,00	-
006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.920.700,00	6.920.700,00	-
007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.039.200,00	7.039.200,00	-
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.306.559.371,00	24.202.848.353,00	-
001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.171.478.721,00	24.055.295.053,00	-
005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.356.650,00	40.514.200,00	-
006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.747.500,00	9.747.500,00	-
007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	88.976.500,00	97.291.600,00	-
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.050.000,00	199.303.600,00	(11.746.400,00)



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Setelah Perubahan	(Berkurang) /Bertambah
1	2	3	4	5=4-3
002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00	48.253.600,00	(11.746.400,00)
010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
011	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	151.050.000,00	151.050.000,00	-
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.357.500,00	1.260.992.800,00	368.985.700,00
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.776.400,00	12.776.400,00	-
002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.411.500,00	734.116.200,00	310.709.700,00
003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.112.200,00	19.112.200,00	-
004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.711.100,00	95.282.200,00	33.596.500,00
005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.426.500,00	57.948.000,00	8.521.500,00
006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
008	Fasilitas Kunjungan Tamu	28.600.000,00	28.600.000,00	-
009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.612.000,00	202.450.000,00	16.158.000,00
010	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	10.707.800,00	10.707.800,00	-
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.521.700,00	134.521.700,00	-
005	Pengadaan Mebel	134.521.700,00	134.521.700,00	-
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.668.450,00	307.068.600,00	8.500.000,00
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.015.400,00	62.327.800,00	-
004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.653.050,00	244.740.800,00	8.500.000,00
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.443.762,00	957.643.762,00	66.550.000,00
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.497.000,00	261.497.000,00	24.000.000,00
006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.200.000,00	232.500.000,00	42.550.000,00
009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.746.762,00	463.646.762,00	-
04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.929.869.978,00	11.736.173.178,00	2.067.675.900,00
2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.929.869.978,00	11.736.173.178,00	2.067.675.900,00
001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	116.199.000,00	116.199.000,00	-



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Setelah Perubahan	(Berkurang) /Bertambah
1	2	3	4	5=4-3
002	Alanisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	371.448.200,00	373.981.200,00	(47.842.000,00)
003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	96.376.100,00	594.376.100,00	498.000.000,00
004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	536.246.500,00	738.746.500,00	(258.427.600,00)
005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	704.185.500,00	809.331.700,00	-
006	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	92.676.000,00	192.396.000,00	49.860.000,00
007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	359.196.450,00	1.941.320.450,00	1.475.945.500,00
008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	206.044.500,00	612.581.000,00	64.775.500,00
009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	574.101.000,00	612.340.000,00	-
010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	333.342.800,00	447.847.300,00	85.364.500,00
011	Penagihan Pajak Daerah	929.585.000,00	1.435.285.000,00	-
012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	64.913.000,00	64.913.000,00	-
013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.529.315.928,00	3.580.615.928,00	-
014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelollan Retribusi Daerah	16.240.000,00	216.240.000,00	200.000.000,00

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Perubahan Renja Bapenda Tahun 2025 disusun sebagai pedoman kerja untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan pada tahun 2025. Sebagai upaya dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan diantara seluruh pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang akan dijelaskan berikut ini.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan

penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

- Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
- Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
- Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
- Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor

b) Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersumber dari hasil Penerimaan jasa giro memanfaatkan uang mengendap (idle money), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian serta pendapatan dari denda pajak daerah.

2. Pendapatan Dana Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari

provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya Struktur Pendapatan Daerah berpedoman berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah tahun 2025, selanjutnya untuk proyeksi/target Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 5.1
PENDAPATAN DAERAH APBD TAHUN 2024, REALISASI 2024, APBD
2025 DAN PENDAPATAN DAERAH PERUBAHAN RKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (rupiah)				
		APBD 2024	Realisasi 2024	APBD 2025	APBD 2025 parsial	P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	3.452.767.649.123,00	3.410.264.951.636,00	3.465.066.875.614,00	3.367.314.144.635,00	3.421.424.156.224,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	786.934.566.871,00	799.932.118.379,00	952.021.711.556,00	955.021.711.556,00	968.289.853.079,00
4.1.01	Pajak Daerah	571.000.000.000,00	590.254.784.373,00	741.518.755.652,00	741.518.755.652,00	771.086.897.175,00
4.1.02	Retribusi Daerah	17.789.533.900,00	14.701.304.603,00	194.607.048.593,00	197.607.048.593,00	193.759.918.659,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525,00	1.306.239.012,00	1.253.070.525,00	1.253.070.525,00	1.253.070.525,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	196.891.962.446,00	193.669.790.391,00	14.642.836.786,00	14.642.836.786,00	43.031.836.786,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.665.833.082.252,00	2.610.332.833.257,00	2.513.045.164.058,00	2.412.292.433.079,00	2.412.292.433.079,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.261.702.720.000,00	2.221.997.027.103,00	2.335.113.284.000,00	2.204.897.561.000,00	2.204.897.561.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	404.130.362.252,00	388.335.806.154,00	177.931.880.058,00	207.394.872.079,00	207.394.872.079,00
Jumlah Pendapatan		3.452.767.649.123,00	3.410.264.951.636,00	3.465.066.875.614,00	3.367.314.144.635,00	3.421.424.156.224,00

SUMBER : BAPENDA TAHUN 2025

Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 pada Pendapatan Asli Daerah, terdapat perbedaan pada pos proyeksi lain-lain PAD yang sah dan Retribusi dikarenakan perubahan rekening belanja BLUD dan penyesuaian pendapatan dari opsen Pajak PKB dan BBNKB. Pada Pendapatan Transfer dilakukan penyesuaian karena berkaitan dengan penerimaan dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat antara lain Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dana Tambahan. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,



pengembangan wilayah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengurangan dan penanggulangan resiko bencana yang sering terjadi setiap tahun dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan guna pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Bandung Barat, 09 Oktober 2025

Plt. KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



HERU BUDI PURNOMO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197009011995031003



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi Bapenda KBB.....	7
GAMBAR 3.1	Konsep Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	38
GAMBAR 3.1	Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Badan Pendapatan Daerah.....	39
GAMBAR 3.3	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	42



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Realisasi Dan Tingkat Capaian Keuangan dan Kinerja T.A. 2024 Bapenda Kabupaten Bandung Barat.....	15
TABEL 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	20
TABEL 2.3	Faktor Penghambat Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025.....	27
TABEL 2.4	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	31
TABEL 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	32
TABEL 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Pokok Pikiran DPRD dan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat.....	33
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPENDA 2025-2029.....	38
TABEL 3.2	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat	43
TABEL 3.3	Rumusan Rencana Program Kegiatan BAPENDA KBB Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026.. ..	58
TABEL 4.1	Rencana Pendanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Perubahan Tahun Anggaran.....	83
TABEL 5.1	Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024, Realisasi 2024, APBD 2025 dan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025..	89



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025